

**Communication Process The Perpetrator of Corruption  
(Descriptive Study Communication Process the Perpetrator of Regional  
Parliament in Over District/Cities and Provinces (DPRD))**

*Abstract*

*Faidah Nailatir Rahmah  
1204104047*

*Corruption at this time is a social issue that caught the public attention. Corruption was clearly an unacceptable activity because it is stolen public right. Indonesia is a country with highest level of corruptivity in South East Asia basic on Transparency Organization data. Indonesia also stand on high level between another country in the world. Although Indonesia have a foundation for facing corruption but the reality it can not work to exterminated the corruption until this time because there are a basically causes that should be clear first than that corruptivity it self. So researcher need to research the comminication process between former of the city or province parliament. In this study, the author used a qualitative approaching with a descriptive study method which involves the perpetrators of corruption at district/cities and province legislative level. The results showed that the interaction between the perpetrators of corruption and the work environment is face-to-face interaction over an interpersonal communication context, and group communication. Message which used in those process is verbal and non-verbal messages. While the characteristic of the communicator in the communication process is the individuals who unsatisfied by their earned salary and has a high demand of physical needs. Media studied to identify the type of communication process that occur either primary or secondary communication process. Corruption in communication can occur because of their needs or some other purpose which supported by the power or authority by reducing public rights which is done by denying the rules of normative truth and moral responsibility.*

*Word Order: Communication Process, Corruption, Legislative, Executive*

**Proses Komunikasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**  
**(Studi Deskriptif Proses Komunikasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada**  
**Pejabat DPRD Tingkat Kabupaten / Kota dan Propinsi)**

**Abstrak**

*Faidah Nailatir Rahmah*  
*1204104047*

*Korupsi saat ini merupakan isu sosial yang menjadi perhatian publik. Tindakan korupsi telah jelas merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dibenarkan karena mencuri hak publik atau hak orang banyak. Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara menurut data dari salah satu organisasi peneliti korupsi, yakni [www.transparency.org](http://www.transparency.org). Selain ranking pertama di Asia Tenggara, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki peringkat tinggi dari negara lain di dunia. Meskipun di Indonesia didirikan sebuah lembaga bernama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) namun pada kenyataannya hingga saat ini Indonesia belum bersih dari tindak pidana korupsi. Maka seharusnya ada hal yang lebih mendasar yang harus dituntaskan, melebihi dari sekedar menuntaskan kasus itu sendiri. Proses komunikasi yang terjadi antara pelaku tindak pidana korupsi dengan individu yang ada di lingkungan kerjanya merupakan hal yang perlu diteliti sehingga mengetahui bagaimana korupsi itu sebenarnya terjadi pada lingkungan pejabat DPRD Kota / Kabupaten dan Propinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif, yang melibatkan para pelaku korupsi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan propinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara pelaku korupsi dengan lingkungan kerjanya adalah interaksi tatap muka dalam konteks komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok. Pesan yang digunakan dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan nonverbal. Sedangkan karakteristik komunikator pada proses komunikasi adalah para individu yang merasa gaji yang diperoleh masih rendah, dan memiliki kebutuhan yang tinggi atas *physical needs*. Media diteliti untuk mengidentifikasi jenis proses komunikasi yang terjadi, proses komunikasi primer atau sekunder. Korupsi dalam komunikasi dapat terjadi karena adanya kebutuhan atau tujuan tertentu dari sebuah komunikasi yang ditunjang oleh kekuasaan atau wewenang dengan mengurangi hak publik, yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah kebenaran normatif dan tanggung jawab moral.*

*Kata Kunci: Proses Komunikasi, Tindak Pidana Korupsi, Legislatif, Eksekutif*